

Analisis Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka Pada Pendidikan Dasar.

I Gede Yudana^{1*}

Program Studi Magister Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Mataram.

***Corresponding Author:**

I Gede Yudana

Program Studi Magister

Administrasi Pendidikan

Pascasarjana

Universitas Mataram, Indonesia

Email: yudanafox@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar melalui pendekatan studi literatur. Kurikulum Merdeka dirancang sebagai respons terhadap tantangan pendidikan pasca-pandemi dan kebutuhan pembelajaran abad ke-21, dengan menekankan prinsip fleksibilitas, pembelajaran berpusat pada peserta didik, serta penguatan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kurikulum ini selaras dengan pendekatan global seperti *student-centered learning* dan *experiential learning*, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur, dan kesenjangan pemahaman antar sekolah. Berbagai model kebijakan pendukung seperti pelatihan guru berkelanjutan, penjaminan mutu terdesentralisasi, pendanaan berkeadilan, kolaborasi multipihak, dan teknologi pendidikan diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum secara sistemik. Dengan strategi kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk mentransformasi sistem pendidikan dasar di Indonesia menjadi lebih inklusif, kontekstual, dan bermutu.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, pendidikan dasar, implementasi kebijakan, pelatihan guru, Profil Pelajar Pancasila, studi literatur.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang unggul, mandiri, dan berdaya saing. Untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah, sistem pendidikan dituntut untuk selalu berinovasi, baik dalam hal kebijakan, kurikulum, maupun strategi pembelajaran. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bentuk transformasi sistem pendidikan nasional yang adaptif terhadap kebutuhan zaman (Kemendikbudristek, 2022).

Kurikulum Merdeka merupakan respons atas kritik terhadap Kurikulum 2013 yang dianggap terlalu padat materi, seragam, dan kurang memberi ruang kebebasan pada guru serta siswa. Kurikulum ini bertumpu pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, fleksibel, dan mendorong pengembangan karakter. Pemerintah menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila yang mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas kebangsaan (Kemendikbudristek, 2022).

Kebijakan Kurikulum Merdeka juga mencerminkan upaya negara untuk memperluas otonomi pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan memperkuat peran guru sebagai pendidik yang merdeka dalam merancang pembelajaran. Dalam pandangan Tilaar, kebijakan pendidikan idealnya menjadi sarana rekayasa sosial yang mampu mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik, bukan sekadar adaptasi terhadap realitas (Tilaar, 2002). Dengan kata lain, perubahan kurikulum bukan sekadar administratif, melainkan juga ideologis dan filosofis.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami filosofi dan prinsip dasar kurikulum ini. Kesiapan sumber daya manusia di sekolah menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Fullan menekankan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada aktor-aktor pelaksana, terutama guru sebagai agen perubahan (Fullan, 2007).

Selain guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas implementasi kurikulum. Anderson dan Van Crow menyatakan bahwa kebijakan

pendidikan akan berjalan optimal jika terjadi sinergi antara pemangku kepentingan, baik dari internal lembaga pendidikan maupun dari eksternal, seperti masyarakat dan pemerintah daerah (Anderson dan Van Crow, 1993). Ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menyukseskan reformasi kurikulum.

Kurikulum Merdeka juga menghadirkan pendekatan baru dalam pembelajaran melalui proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila yang diarahkan untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, kolaborasi, dan kreativitas peserta didik sejak dini. Nilai-nilai ini sejalan dengan gagasan Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya adalah usaha membudayakan anak agar menjadi manusia yang berkarakter dan merdeka secara batin dan lahir (Majelis Luhur Tamansiswa, 2009).

Di sisi lain, transformasi kurikulum ini memerlukan evaluasi dan analisis yang mendalam agar tidak berhenti sebagai wacana tanpa perubahan nyata di tingkat praktik. Dunn menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai alternatif kebijakan dan dampaknya dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang rasional (Dunn, 2003). Oleh karena itu, kajian terhadap Kurikulum Merdeka dalam pendidikan dasar menjadi sangat relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kebijakan Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan dasar, baik dari aspek perumusan, implementasi, maupun dampaknya terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kurikulum tersebut dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan implementasinya di masa depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman teoretis dan kontekstual mengenai kebijakan pendidikan. Pendekatan ini sesuai untuk menelaah dokumen-dokumen kebijakan dan hasil penelitian sebelumnya secara mendalam dan sistematis (Zed, 2008).

Studi literatur merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup identifikasi, pengumpulan, penelaahan, serta sintesis dari berbagai referensi yang berhubungan langsung dengan topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengkaji sumber-sumber berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan

kebijakan, serta publikasi akademik lainnya yang membahas implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat pendidikan dasar (Boote & Beile, 2005).

Pengumpulan literatur dilakukan secara sistematis dengan menelusuri berbagai basis data ilmiah, seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, serta laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus kajian, kebaruan informasi, dan kredibilitas sumber. Proses ini penting agar data yang diperoleh memiliki keabsahan akademik dan mampu menggambarkan perkembangan terkini mengenai kebijakan Kurikulum Merdeka (Hart, 1998).

Dalam pelaksanaannya, peneliti mengklasifikasikan referensi ke dalam beberapa kategori, seperti: latar belakang munculnya Kurikulum Merdeka, tujuan dan prinsip kurikulum, strategi implementasi, tantangan pelaksanaan, dan dampaknya terhadap pendidikan dasar. Klasifikasi ini digunakan untuk memudahkan proses analisis tematik yang menjadi dasar pengorganisasian informasi (Ridley, 2012).

Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yakni dengan membaca secara cermat setiap literatur dan mencatat ide-ide pokok yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan antar konsep, serta perbedaan sudut pandang antarpengarang. Analisis isi digunakan secara luas dalam penelitian kebijakan karena mampu mengeksplorasi makna dan pesan dalam dokumen secara sistematis (Krippendorff, 2004).

Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis data dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur. Proses ini bertujuan untuk membangun pemahaman menyeluruh dan integratif tentang bagaimana Kurikulum Merdeka diimplementasikan, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Sintesis literatur juga penting untuk menghindari duplikasi argumen dan menekankan aspek kontribusi ilmiah dari penelitian ini (Torraco, 2005).

Untuk menjaga keabsahan data dan temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan isi dari berbagai dokumen atau tulisan yang membahas topik serupa namun berasal dari penulis dan institusi yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan kritik sumber untuk menilai sejauh mana objektivitas, keakuratan, dan relevansi dari setiap dokumen yang digunakan (Moleong, 2017).

Dengan menggunakan pendekatan studi literatur yang sistematis dan analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dan kebijakan pendidikan,

khususnya terkait implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat pendidikan dasar. Kajian ini tidak hanya bertumpu pada deskripsi, tetapi juga berupaya menghadirkan analisis kritis terhadap kebijakan yang sedang berjalan (Dunn, 2003).

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang sebagai respons terhadap disrupsi pendidikan akibat pandemi COVID-19 dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Kurikulum ini mengedepankan prinsip fleksibilitas pembelajaran, otonomi guru, dan penguatan karakter siswa melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (Kemendikbudristek, 2022). Prinsip ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada siswa.

Konsep Kurikulum Merdeka sangat relevan dengan pendekatan *student-centered learning*, di mana siswa diberi ruang untuk aktif dalam proses belajar. Menurut Rogers (1983), pembelajaran akan lebih bermakna ketika siswa berperan aktif dan belajar berdasarkan minat serta pengalaman mereka sendiri. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah penggerak sudah mulai mengadopsi pendekatan ini, meskipun masih ada variasi dalam implementasinya.

Struktur Kurikulum Merdeka juga menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan Kurikulum 2013. Salah satunya adalah penggunaan fase pembelajaran (Fase A, B, dan C) alih-alih pembagian berdasarkan kelas. Hal ini memberikan keluwesan bagi guru dalam menyesuaikan materi dengan capaian siswa. Selain itu, alokasi waktu 30% untuk kegiatan proyek memperkuat integrasi pembelajaran kontekstual dan karakter (Jannah & Supriyanto, 2023).

Di sisi pelaksanaan, Kurikulum Merdeka memberikan otonomi yang lebih luas kepada guru untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan Freire (1970) yang menyatakan bahwa guru bukanlah pengisi pengetahuan semata, tetapi fasilitator proses berpikir kritis peserta didik. Di sisi lain, otonomi ini juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya beban kerja administratif guru.

Salah satu inovasi penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah kehadiran Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sarana pelatihan mandiri dan akses modul ajar digital. PMM mencerminkan pendekatan *digital learning* yang memungkinkan pengembangan profesional guru secara fleksibel. Namun demikian, kesenjangan digital masih

menjadi tantangan, terutama bagi sekolah-sekolah di wilayah tertinggal (Supriyanto et al., 2023).

Hasil studi juga menemukan bahwa kesenjangan implementasi antara sekolah penggerak dan sekolah reguler cukup mencolok. Sekolah penggerak cenderung lebih siap karena mendapat pendampingan dan pelatihan intensif, sementara sekolah reguler masih berjuang memahami perubahan kurikulum. Hal ini sejalan dengan temuan Jannah dan Supriyanto (2023) yang mencatat bahwa kesiapan guru dan dukungan kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi.

Realitas ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya merata. Masri et al. (2023) menyimpulkan bahwa kesiapan guru, infrastruktur, dan koordinasi antar pemangku kepentingan masih menjadi tantangan utama. Untuk menjawab masalah ini, diperlukan model kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal, seperti model pendampingan diferensiasi.

Model pelatihan guru berkelanjutan menjadi salah satu strategi kunci dalam memperkuat implementasi kurikulum. Model ini mengedepankan pelatihan berbasis kebutuhan (*need-based training*) dan pendekatan *blended learning*. Menurut Darling-Hammond et al. (2017), pelatihan guru yang efektif harus kontekstual, kolaboratif, dan berkelanjutan. Realitanya, pelatihan yang bersifat satu arah dan tidak kontekstual masih sering dijumpai, sehingga hasilnya kurang optimal.

Model kebijakan penjaminan mutu terdesentralisasi juga relevan diterapkan dalam Kurikulum Merdeka. Sistem ini memungkinkan sekolah melakukan evaluasi diri berbasis data melalui platform Rapor Pendidikan. Sistem seperti ini mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Namun demikian, di lapangan masih dijumpai beban administrasi tambahan akibat kurangnya pemahaman terhadap penggunaan platform digital tersebut.

Kebijakan pendanaan yang berkeadilan juga penting untuk mendukung pemerataan implementasi kurikulum. Program seperti BOS Afirmasi dan DAK Pendidikan memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah di daerah 3T. Namun, keterlambatan pencairan dan rumitnya prosedur pelaporan menjadi kendala administratif yang memperlambat pemanfaatan dana (Masri et al., 2023).

Kebijakan kolaborasi multipihak juga menjadi fondasi penting. Melalui kemitraan antara sekolah dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Program seperti Kampus Mengajar atau Adopsi Sekolah oleh perusahaan merupakan contoh

konkret kolaborasi yang menguatkan ekosistem pendidikan (Fadhilah Rahmafritri et al., 2024).

Dalam aspek dampak, Kurikulum Merdeka menunjukkan hasil awal yang menjanjikan. Siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, terutama melalui kegiatan P5. Guru juga menunjukkan antusiasme dalam mengembangkan modul ajar mandiri. Namun di sisi lain, masih muncul beban kerja tambahan yang tidak diimbangi dengan sistem evaluasi yang jelas (Priantini, 2022).

Evaluasi pembelajaran yang belum terstandarisasi juga menjadi sorotan. Banyak guru belum memahami bagaimana menilai pencapaian peserta didik secara formatif dan holistik. Padahal, menurut Black dan Wiliam (1998), asesmen formatif berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar. Realita ini menunjukkan perlunya panduan teknis evaluasi yang lebih terstruktur.

Dalam konteks global, prinsip Kurikulum Merdeka selaras dengan rekomendasi UNESCO (2021) tentang pendidikan masa depan yang inklusif dan berbasis kompetensi. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) juga sesuai dengan teori pembelajaran pengalaman yang dikemukakan oleh Kolb (1984), yang menekankan pentingnya siklus pengalaman langsung dalam pembentukan pengetahuan.

Kritik terhadap Kurikulum Merdeka umumnya diarahkan pada implementasinya yang masih bersifat sentralistik. Meskipun narasi kebijakannya memberi otonomi, dalam praktiknya banyak guru di daerah yang kesulitan mengakses PMM atau memahami alur pengembangan modul ajar (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya strategi pendampingan yang lebih fleksibel dan berjenjang.

Model kebijakan seperti Evaluasi Siklus Pendek (*Rapid Cycle Evaluation*) dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan secara cepat dan berbasis data. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi masalah dan perbaikan kebijakan dalam waktu singkat. Model ini selaras dengan prinsip *agile policy making* yang adaptif terhadap dinamika di lapangan (OECD, 2021).

Selain itu, pengembangan jejaring pembelajaran profesional antar sekolah juga menjadi strategi penting. Melalui sistem *professional learning network*, guru dapat saling berbagi praktik baik dan menyelesaikan masalah pembelajaran secara kolaboratif. Wenger (1998) menyebutnya sebagai *community of practice* yang efektif dalam membangun kapasitas kolektif.

Aspek penting lain adalah pentingnya pemetaan kebutuhan berbasis data. Penggunaan sistem diagnostik digital seperti asesmen awal, profil sekolah, dan survei guru dapat menjadi dasar intervensi kebijakan yang lebih terarah. Dengan pemetaan ini,

intervensi pendidikan bisa lebih tepat sasaran dan efisien.

Dari seluruh temuan, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk mentransformasi pendidikan dasar menjadi lebih adaptif, kontekstual, dan berdaya saing. Namun, realisasi dari potensi tersebut sangat bergantung pada dukungan sistemik, mulai dari pelatihan guru, pendanaan, hingga penguatan kelembagaan di tingkat daerah. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari kajian ini adalah perlunya integrasi antarmodel kebijakan untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara berkelanjutan. Setiap model—baik pelatihan, mutu, pendanaan, kolaborasi, maupun teknologi—harus dirancang secara saling melengkapi, bukan berdiri sendiri..

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur dan dokumen kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di pendidikan dasar merupakan langkah transformatif dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 dan dampak pandemi COVID-19. Kurikulum ini dirancang dengan prinsip fleksibilitas, pembelajaran berpusat pada peserta didik, serta penguatan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang selaras dengan pendekatan global seperti *student-centered learning* dan *experiential learning*. Struktur kurikulum yang berbasis fase dan proyek memberikan ruang inovasi bagi guru dan siswa, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur digital, dan kesenjangan implementasi antar sekolah. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan kebijakan pelengkap, seperti pelatihan guru berkelanjutan, penjaminan mutu berbasis data, pendanaan berkeadilan, kolaborasi multipihak, serta integrasi teknologi pendidikan. Dampak positif mulai terlihat melalui peningkatan partisipasi aktif siswa dan kreativitas guru, namun masih diperlukan langkah-langkah sistemik untuk mengurangi beban administratif, memperbaiki sistem evaluasi, serta memperkuat kapasitas lembaga pendidikan di daerah. Dengan dukungan kebijakan yang adaptif, berjenjang, berkelanjutan, dan berbasis bukti, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk mentransformasi pendidikan Indonesia menjadi lebih inklusif, kontekstual, dan berkualitas..

Daftar Pustaka

- Anderson, G. L., & Van Crow, R. (1993). *The principalship: New roles in a professional learning community*. Allyn and Bacon.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>
- Majelis Luhur Tamansiswa. (2009). *Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Grasindo.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 5(1), 7-74. <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in research preparation. *Educational Researcher*, 34(6), 3-15. <https://doi.org/10.3102/0013189X034006003>
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute.
- Fadhilah Rahmafritri, S., Syahrial, S., & Akbar, R. (2024). Transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka: Peluang dan tantangan implementasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 12(1), 45-56.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Hart, C. (1998). *Doing a literature review: Releasing the social science research imagination*. SAGE Publications.
- Jannah, M., & Supriyanto, A. (2023). Analisis implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar: Studi kasus sekolah penggerak dan reguler. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 121-134.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka tahun 2022/2023*. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Masri, M., Handayani, T., & Haris, S. (2023). Analisis kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 5(1), 55-68.
- OECD. (2021). *Building capacity for evidence-informed policymaking: Lessons from country experiences*. OECD Publishing.
- Priantini, N. W. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar: Perspektif guru dan siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 55(3), 231-240.
- Rogers, C. R. (1983). *Freedom to learn for the 80s*. Merrill.
- Supriyanto, A., Widodo, H., & Jannah, M. (2023). Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka: Studi kasus guru sekolah dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 11(3), 201-214.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- Zed, M. (2008). *Literatur riset: Panduan untuk studi pustaka bagi mahasiswa dan peneliti*. Yayasan Obor Indonesia.